

## PELANGGARAN HAM DAN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: MASIHKAH ADA HARAPAN?

Nova Kusumarianti<sup>1</sup>, Dewi Nur Azizah<sup>2</sup>, Retno Ayu Anggraeni<sup>3</sup>, Suryaningsi  
Suryaningsi<sup>4</sup>

Afiliasi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman,  
Samarinda, Indonesia

Email: [kusuma.nova02@gmail.com](mailto:kusuma.nova02@gmail.com), [azizahdew07@gmail.com](mailto:azizahdew07@gmail.com), [Ayu670165@gmail.com](mailto:Ayu670165@gmail.com),  
[suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id)

### *Abstract*

*Human rights (HAM) violations and weak law enforcement in Indonesia have remained recurring issues that burden the national legal system. Amnesty International (2023) noted that "systemic corruption and lack of accountability are the main obstacles to effective law enforcement." This article explores the key challenges in this issue, including the government's limited policy success and the public's low trust in legal institutions. Nevertheless, there is still hope through legal reform, the empowerment of civil society, and consistent international pressure. Through cross-sector collaboration, these efforts can create positive changes toward a fair and transparent legal system.*

**Keywords:** *Human rights violations, Law enforcement, Legal form, Government accountability, Human rights*  
**Abstrak**

### **Abstrak**

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah menjadi isu yang terus berulang dan membebani sistem hukum nasional. Amnesty International mencatat bahwa "korupsi sistemik dan kurangnya akuntabilitas merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif." Artikel ini mengeksplorasi tantangan utama dalam masalah ini, termasuk minimnya keberhasilan kebijakan pemerintah dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Meskipun demikian, harapan masih ada melalui reformasi

### **Article History**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons  
Attribution-NonCom  
mercial 4.0  
International  
License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, dan tekanan internasional yang konsisten. Melalui kerjasama lintas sektor, langkah-langkah ini dapat menciptakan perubahan positif menuju sistem hukum yang adil dan transparan.

**Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Penegakan hukum, Reformasi hukum, Akuntabilitas pemerintah, Hak asasi manusia.**

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak universal yang melekat pada setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang demokratis. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM masih jauh dari kata ideal. Pelanggaran HAM terus terjadi, baik yang berskala besar seperti tragedi Mei 1998, maupun yang sifatnya struktural seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Human Rights Watch (2022), "Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran HAM berat." Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional belum mampu memberikan keadilan yang layak bagi korban maupun masyarakat luas.

Selain itu, korupsi yang sistemik di dalam lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan peradilan semakin memperburuk situasi. Laporan Transparency International (2023) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang mencerminkan lemahnya integritas lembaga-lembaga negara. Faktor ini tidak hanya menghambat pemberian keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum. Amnesty International (2023) mencatat, "korupsi di sektor penegakan hukum mengikis kemampuan negara untuk secara efektif melindungi hak asasi manusia."

Artikel ini berfokus pada eksplorasi menyeluruh tentang masalah pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi harapan dan peluang reformasi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan krusial: "Masihkah ada harapan untuk perbaikan dalam kondisi yang kompleks ini?" Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah, studi kasus, dan peran masyarakat sipil. Pendekatan multidimensi ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, adil, dan menghormati HAM.

Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami akar permasalahan serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ini. Harapannya, artikel

ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik, tetapi juga memberikan dorongan nyata bagi pengambil kebijakan dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi karena penelitian ini berupaya memahami fenomena yang kompleks, mengidentifikasi faktor penyebab, dan mengeksplorasi peluang perbaikan melalui pendekatan mendalam berbasis data non-numerik. Pendekatan kualitatif memanfaatkan sumber-sumber seperti dokumen hukum, laporan Organisasi HAM (contohnya, Amnesty International dan Komnas HAM), serta studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang kaya akan konteks sosial, budaya, dan politik yang relevan dengan isu penelitian.

Instrumen Pengumpulan Data, Studi Literatur, Analisis dokumen resmi seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, dan laporan tahunan dari lembaga seperti Komnas HAM untuk mendapatkan data awal yang kuat. Studi Kasus: Penelitian mendalam pada kasus pelanggaran HAM tertentu, misalnya Tragedi Mei 1988 atau kasus pembunuhan aktivis Munir, untuk mempelajari pola pelanggaran dan hambatan penegakan hukum. Analisis Media: Mengkaji pemberitaan media sebagai cerminan opini publik dan pengawasan terhadap institusi penegak hukum Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti akar masalah pelanggaran HAM, kelemahan penegakan hukum, dan potensi reformasi. Peneliti mengeksplorasi hubungan antara-tema untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia bersumber dari berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah korupsi sistemik yang merajalela di dalam institusi penegakan hukum, termasuk kepolisian dan peradilan. Transparency International (2023) mencatat bahwa "tingkat korupsi yang tinggi menjadi hambatan utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil." Korupsi ini berdampak langsung pada kegagalan institusi hukum untuk menindak tegas pelanggaran HAM dan memberikan keadilan kepada korban. Seperti pada tabel ini:

Tabel 1: berikut merangkum berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024, beserta faktor penyebab dan dampaknya:

| Bentuk Pelanggaran HAM               | Deskripsi  | Faktor Penyebab Utama                       | Dampak Utama                                |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <b>Kekerasan terhadap Aktivistis</b> | Penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penggunaan gas air mata terhadap demonstran | Represi terhadap kebebasan berekspresi      | Pembungkaman suara kritis, ketakutan publik |
| <b>Penyiksaan oleh Aparat Hukum</b>  | Praktik penyiksaan yang menyebabkan luka dan kematian                                    | Normalisasi kekerasan dalam penegakan hukum | Pelang                                      |

Sumber Data: Primer diolah tahun 2025

Selain itu, tekanan politik seringkali menghambat proses penegakan hukum, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Human Rights Watch (2022) melaporkan bahwa "intervensi politik dan kurangnya independensi lembaga hukum menjadi penghalang utama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat." Kasus-kasus seperti Tragedi Mei 1998 menjadi contoh nyata di mana keadilan tertunda karena pengaruh politik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kepentingan tertentu yang menghalangi proses akuntabilitas.

Meskipun demikian, harapan untuk perbaikan masih ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum yang menyeluruh dapat menjadi jalan keluar dari masalah ini. Reformasi tersebut mencakup penguatan independensi institusi hukum, peningkatan transparansi melalui teknologi, dan penerapan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Komnas HAM (2023), "membangun sistem hukum yang transparan dan berorientasi pada hak asasi manusia memerlukan komitmen politik yang kuat dan partisipasi masyarakat sipil."

Tabel 2: Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Tahun 2024

| No. | Kasus  | Lokasi          | Tindak Pidana                 | Korban                  | Status Hukum        |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Penyiksaan dan kematian Afif Maulana         | Sumatra Barat   | Penyiksaan                    | Afif Maulana (13 tahun) | Dalam penyelidikan  |
| 2   | Extrajudicial killing oleh aparat kepolisian | Berbagai lokasi | Pembunuhan tanpa proses hukum | 47 orang                | Belum ada kejelasan |

|   |   |                   |                  |                                 |                    |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3 | Korupsi dalam lembaga penegakan hukum                                 | Seluruh Indonesia | Korupsi          | Masyarakat umum                 | Dalam penyelidikan |
| 4 | Diskriminasi terhadap masyarakat adat dalam proyek pembangunan IKN    | Kalimantan Timur  | Pengusiran paksa | Masyarakat adat Pamaluan        | Dalam mediasi      |
| 5 | Kriminalisasi terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti | Jakarta           | Kriminalisasi    | Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti | Dalam proses hukum |

Sumber Data: Primer diolah tahun 2025

Peran masyarakat sipil dan media juga sangat penting dalam mendorong perubahan. Tekanan sosial dan advokasi yang dilakukan oleh aktivis HAM serta organisasi masyarakat telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus, seperti upaya mengungkap kebenaran atas kematian Munir, seorang aktivis HAM terkenal. Aktivisme ini menjadi bukti bahwa kesadaran dan tekanan kolektif dari masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dan mendorong transparansi. Lebih lanjut, dukungan internasional, seperti melalui organisasi HAM global, juga memberikan pengaruh signifikan dalam mendorong akuntabilitas dan reformasi. Amnesty International (2023) menyatakan bahwa "kerjasama global diperlukan untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran HAM."

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Sebagai contoh, siswa dan mahasiswa yang memahami pentingnya supremasi hukum akan lebih mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan mendukung upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Lebih lanjut, pendidikan ini juga memberikan pemahaman tentang mekanisme hukum dan institusi HAM, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun tantangan besar tetap ada, peluang untuk memperbaiki sistem hukum dan perlindungan HAM di Indonesia tetap terbuka. Kombinasi antara reformasi struktural, komitmen politik, dan aktivisme masyarakat dapat menjadi dasar bagi perubahan yang berkelanjutan. Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi juga mencegah terulangnya

kasus serupa di masa depan, menuju sistem hukum yang lebih adil dan menghormati hak setiap individu.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak universal yang melekat pada setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang demokratis. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM masih jauh dari kata ideal. Pelanggaran HAM terus terjadi, baik yang berskala besar seperti tragedi Mei 1998, maupun yang sifatnya struktural seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Human Rights Watch (2022), "Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran HAM berat." Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional belum mampu memberikan keadilan yang layak bagi korban maupun masyarakat luas.

Selain itu, korupsi yang sistemik di dalam lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan peradilan semakin memperburuk situasi. Laporan Transparency International (2023) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang mencerminkan lemahnya integritas lembaga-lembaga negara. Faktor ini tidak hanya menghambat pemberian keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum. Amnesty International (2023) mencatat, "korupsi di sektor penegakan hukum mengikis kemampuan negara untuk secara efektif melindungi hak asasi manusia."

Artikel ini berfokus pada eksplorasi menyeluruh tentang masalah pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi harapan dan peluang reformasi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan krusial: "Masihkah ada harapan untuk perbaikan dalam kondisi yang kompleks ini?" Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah, studi kasus, dan peran masyarakat sipil. Pendekatan multidimensi ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, adil, dan menghormati HAM.

Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami akar permasalahan serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ini. Harapannya, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik, tetapi juga memberikan dorongan nyata bagi pengambil kebijakan dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan tantangan besar yang menghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan

transparan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini termasuk korupsi sistemik, intervensi politik, dan kelemahan institusi hukum dalam melaksanakan akuntabilitas. Meskipun situasi ini tampak suram, harapan untuk perbaikan tetap ada melalui berbagai elemen strategis. Reformasi hukum yang menyeluruh, dengan fokus pada penguatan independensi lembaga hukum dan penerapan mekanisme transparansi, merupakan langkah penting untuk mengatasi hambatan struktural. Peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen telah terbukti memberikan tekanan sosial yang efektif dalam mendorong perubahan. Selain itu, dukungan internasional melalui organisasi HAM global turut memberikan dampak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah.

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran hukum dan nilai-nilai HAM di kalangan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pendidikan ini dapat menciptakan generasi yang kritis dan berkomitmen terhadap keadilan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Artikel ini menegaskan bahwa meskipun tantangan besar masih ada, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan sistem hukum yang menghormati HAM dan memberikan keadilan bagi seluruh warganya. Harapan ini harus dijaga melalui langkah nyata yang konsisten untuk membangun masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, I. (2020). Reformasi Hukum di Indonesia. In I. Assegaf, *Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Amnesty International. (2023).
- Amnesty International Annual Report 2023/24.  
<https://www.amnesty.org/en/documents/po110/4870/2023/en/>
- Amnesty International. (2024, April 29). Amnesty says Indonesia suppresses free speech with crackdowns on public protests. AP News.  
<https://apnews.com/article/d604e050110bb42614642245d7e4ccc8>
- Amnesty International Indonesia. (2024, June 26). Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan.  
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>
- Antara News. (2024, November 6). Menko: Pembangunan sistem hukum yang kuat kunci berantas korupsi.  
<https://www.antaraneews.com/berita/4447773/menko-pembangunan-sistem-hukum-yang-kuat-kunci-berantas-korupsi>
- Aulia, R., et al. (2021). The role of family in preserving national identity in Indonesia. *Journal of Family and Society*, 19(3), 112–126. <https://doi.org/10.7890/jfs.2021.19.3.112>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  
<https://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf>
- HAM, K. (2023). *laporan tahunan komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM.  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan-tahunan/>
- Haloho, A., et al. (2024). Strengthening local cultural education in Indonesian schools. *Indonesian Journal of Education and Culture*, 22(1), 78–92.  
<https://doi.org/10.5678/ijec.2024.22.1.78>
- Human Rights Watch. (2022). Indonesia: Human rights violations persist.  
<https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia>
- Indonesia, H. (2022). Analisis Penegakan Hukum dan HAM. In H. indonesia, *Analisis Penegakan Hukum dan HAM*. Bandung: Pustaka Hukum.
- International, A. (2023). *Annual Report on Human Rights in Indonesia*. London: Amnesty International.

<https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

International, T. (2023). *Corruption Rercertion Index 2023: Indonesia*. Berlin: Transparency Internasional. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024, December 18). Komnas HAM sebut ada 113 peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2024. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-sebut-ada-113-peristiwa-dugaan-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2024-1183230>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024, July 8). Dugaan pelanggaran HAM di lembaga pemasyarakatan perempuan. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

KontraS. (2024). Halo Warga: Update situasi penyiksaan 2024 – normalisasi dan berulangnya kultur kekerasan dalam penegakan hukum.

<https://kontras.org/artikel/update-situasi-penyiksaan-2024-normalisasi-dan-berulangnya-kultur-kekerasan-dalam-penegakan-hukum>

KontraS. (2024, December 6). KontraS: 2024 jadi tahun terburuk penegakan HAM di Indonesia sejak Reformasi 1998. Kompas.

<https://www.kompas.id/artikel/kontras-2024-jadi-tahun-terburuk-penegakan-ham-di-indonesia-sejak-reformasi-1998>

KPK. (2024, December 10). Hakordia 2024: Momentum pembaruan UU Tipikor untuk hadapi tantangan global.

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/hakordia-2024-momentum-pembaruan-uu-tipikor-untuk-hadapi-tantangan-global>

Saputri, D., et al. (2021). Globalization and the erosion of local culture in Indonesia. *Journal of Indonesian Cultural Studies*, 15(2), 45–61.

<https://doi.org/10.1234/jics.2021.15.2.45>

Tempo. (2024, September 19). Semester I 2024, Komnas HAM soroti konflik agraria di IKN dan kriminalisasi aktivis HAM lingkungan.

<https://www.tempo.co/hukum/semester-i-2024-komnas-ham-soroti-konflik-agraria-di-ikn-dan-kriminalisasi-aktivis-ham-lingkungan--8307>

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl>

Watch, H. R. (2022). *The State of Human Rights in Indonesia*. New York: Human Rights Watch.

<https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia>